



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 500/Kep.1905-BagEk/2023

TENTANG

PETA JALAN PROGRAM PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK
DALAM NEGERI KOTA BANDUNG TAHUN 2023-2026

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengujian Indeks Kepatuhan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor PE.04.03-358/PW10/5.2/2023 tanggal 26 Juni 2023, hasil Indikator Roadmap Strategi P3DN dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi, skor indeks kepatuhannya belum memenuhi capaian skor indeks yang seharusnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Peta Jalan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Bandung Tahun 2023-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 02/M-IND/PER/1/2014 tentang Pedoman Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri;
 2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 3. Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Nomor PE.04.03-358/PW10/5.2/2003 tanggal 26 Juni 2023 Hal Laporan Hasil Pengukuran Baseline Indeks Kepatuhan P3DN di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Periode Semester 1 Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Peta Jalan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Bandung Tahun 2023-2026.
- KEDUA** : Peta Jalan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kota Bandung Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Peta Jalan P3DN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KETIGA : Peta Jalan P3DN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan panduan pelaksanaan program P3DN periode tahun 2023-2026 bagi setiap Anggota Tim P3DN Kota Bandung dan seluruh Perangkat Daerah, RSUD, RSKGM dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Pencapaian target Peta Jalan P3DN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar dilaporkan oleh setiap Perangkat Daerah, RSUD, RSKGM dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung setiap Triwulan kepada Wali Kota Bandung melalui Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung selaku Koordinator Sekretariat Tim P3DN Kota Bandung.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 September 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,




SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
 NOMOR: 500/Kep.1905-BagEk/2023
 TENTANG
 PETA JALAN PROGRAM PENINGKATAN
 PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI
 KOTA BANDUNG TAHUN 2023-2026

PETA JALAN PROGRAM P3DN TAHUN 2023-2026

Tema	Indikator	Sasaran Tematik	Indikator	Target	Permasalahan (the bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Penanggung Jawab
										Satuan	Indikator	
		Terwujudnya Sistem Tata	Indeks Tata		1. SDM Tata Kelola Pengadaan yang Belum Kompeten	Meningkatnya Pelaku PBJ yang Kompeten	Jumlah SDM Pelaku PBJ yang Tertsertifikasi	N/A	Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan kepada Pelaku PBJ	Orang	Jumlah SDM Pelaku PBJ di yang Dilatih	BKPSDM
									Melakukan Sertifikasi kepada Pelaku PBJ yang Sudah Diberikan Pelatihan	Orang	Jumlah SDM Pelaku PBJ yang Lulus Uji Kompetensi	BKPSDM
									Mengumumkan Seluruh Rencana Umum Pengadaan (RUP) sesuai pagu Pengadaan pada SiRUP		Persentase Paket	
Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri (P3DN)	Realisasi transaksi P3DN	Kelola Pengadaan Barang dan Jasa yang Baik	Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	N/A	Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang Belum Optimal dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya Optimalisasi Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat Kepatuhan Pencatatan Pengadaan Barang dan Jasa melalui SPSE dan P3DN SIPD	N/A	Melaksanakan bimbingan teknis Penggunaan Sistem pada aplikasi P3DN SIPD	Kegiatan	Jumlah laporan kegiatan	BKAD
									Melakukan Monev realisasi TKDN/PDN	Persen	Persentase realisasi TKDN/PDN	BKAD

Tema	Indikator	Sasaran Tematik	Indikator	Target	Permasalahan (the bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Penanggung Jawab
										Satuan	Indikator	
									Melaksanakan Monitoring Kepatuhan PD dalam Pencatatan Paket e-Tendering pada SPSE sesuai pagu RUP e-Tendering	Perangkat Daerah	Jumlah PD yang dimonitoring Kepatuhan PD dalam Pencatatan Paket e-Tendering pada SPSE sesuai pagu RUP e-Tendering	BPBJ
									Melaksanakan Monitoring Kepatuhan PD dalam Pencatatan Paket e- Purchasing pada Katalog Elektronik	Perangkat Daerah	Jumlah PD yang dimonitoring Kepatuhan PD dalam Pencatatan Paket e- Purchasing pada Katalog Elektronik	BPBJ
									Melaksanakan Monitoring Kepatuhan PD dalam Pencatatan paket Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada SPSE	Perangkat Daerah	Jumlah PD yang dimonitoring Kepatuhan PD dalam Pencatatan paket Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada SPSE	BPBJ
									Melaksanakan Monitoring Kepatuhan PD dalam Pencatatan paket transaksional pada e-Kontrak dalam SPSE	Perangkat Daerah	Jumlah PD yang dimonitoring Kepatuhan PD dalam Pencatatan paket transaksional pada e-Kontrak dalam SPSE	BPBJ
									Melaksanakan Evaluasi Kepatuhan PD dalam Pencatatan Seluruh Paket Pekerjaan pada SPSE	Perangkat Daerah	Jumlah PD yang dievaluasi Kepatuhan PD dalam Pencatatan Seluruh Paket Pekerjaan pada SPSE	INSPEKTORAT

Tema	Indikator	Sasaran Tematik	Indikator	Target	Permasalahan (the bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Penanggung Jawab
										Satuan	Indikator	
		Meningkatnya jumlah pelaku usaha PDN/UMKM dalam proses pengadaan (Supply PDN)	Presentase peningkatan pelaku usaha yang terdaftar di katalog lokal	N/A	1. Proses sertifikasi yang sulit	Terwujudnya iklim perijinan pelaku usaha lokal yang mudah dan ramah pelaku usaha	Sertifikasi TKDN bagi Industri Kecil sesuai SLA 14 hari kerja	N/A	Melaksanakan proses sertifikasi TKDN bagi Pelaku Usaha Industri Kecil lokal sesuai SLA 14 hari kerja	Kegiatan	Jumlah Sertifikasi Pelaku Usaha Industri Kecil yang tersertifikasi TKDN	DISDAGIN
Sertifikasi TKDN bagi Industri Menengah sesuai SLA 45 hari kerja	N/A						Melaksanakan proses sertifikasi TKDN bagi Pelaku Usaha Industri Menengah lokal sesuai SLA 45 hari kerja	Kegiatan	Jumlah Sertifikasi Pelaku Usaha Industri Menengah yang tersertifikasi TKDN	DISDAGIN		
Regulasi daerah yang tidak mendukung	N/A						Menerbitkan regulasi daerah yang mendukung P3DN dan UMKM	Dokumen	Jumlah regulasi daerah diterbitkan yang mendukung P3DN dan UMKM	SEKRETARIAT TIM P3DN		
3. Pelaku Usaha yang Belum Memahami terkait Proses Pengadaan	Meningkatnya pemahaman pelaku usaha terkait Proses Pengadaan secara Elektronik						Jumlah pelaku usaha yang paham dengan proses pengadaan secara elektronik	N/A	Melaksanakan Sosialisasi dan Pendampingan kepada Koperasi, Pelaku Usaha dan UMKM lokal terkait Proses Pengadaan Secara Elektronik	Kegiatan	Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Sosialisasi dan Pendampingan kepada Pelaku Usaha dan UMKM lokal terkait Proses Pengadaan Secara Elektronik	BPBJ, DISKOPUKM dan DISDAGIN
4. Pelaku Pengadaan belum mencantumkan TKDN dalam dokumen kontrak		Meningkatnya pencantuman TKDN dalam dokumen kontrak oleh Pelaku Pengadaan	Jumlah kontrak yang mencantumkan TKDN	N/A	Melaksanakan Sosialisasi Kebijakan Pencantuman TKDN dalam Kontrak dengan Pelaku Pengadaan	Kegiatan	Jumlah Pelaku Pengadaan yang mengikuti sosialisasi Kebijakan Pencantuman TKDN dalam Kontrak	BPBJ				

Tema	Indikator	Sasaran Tematik	Indikator	Target	Permasalahan (the bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Penanggung Jawab
										Satuan	Indikator	
					1. Jumlah barang/jasa yang dibutuhkan tidak dapat dipenuhi oleh penyedia				Melaksanakan <i>business matching</i> antara DISDAGIN, OPD, dan dengan pelaku usaha (penyedia)	Kegiatan	Jumlah Pelaku Pengadaan dan Perangkat Daerah yang mengikuti <i>business matching</i>	DISDAGIN
		Meningkatnya realisasi RUP PDN	% capaian RUP PDN	35%	2. Belum adanya kebijakan pemberian preferensi harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Meningkatnya produk/barang PDN yang sesuai kebutuhan	% barang/jasa PDN pada RUP terpenuhi	N/A	Memberikan preferensi harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Persentase	Persentase preferensi harga dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk pembelian produk dalam negeri yang memiliki nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diberikan	BPBJ

Tema	Indikator	Sasaran Tematik	Indikator	Target	Permasalahan (the bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Penanggung Jawab
										Satuan	Indikator	
					3. Belum adanya informasi transaksi penggunaan e-katalog secara komprehensif				Melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan e-katalog terkait harga (telah mencantumkan biaya tambahan seperti biaya kirim, biaya instalasi, dll) dan aktifitas penyedia (aktif atau tidak, bagaimana ratingnya, dll)	Laporan	Laporan hasil Monev e-katalog terkait harga (telah mencantumkan biaya tambahan seperti biaya kirim, biaya instalasi, dll) dan aktifitas penyedia (aktif atau tidak, bagaimana ratingnya, dll)	BPBJ
					4. Belum optimalnya pelaksanaan penilaian penyedia oleh pengguna e-katalog				Melaksanakan monitoring dan evaluasi penilaian penyedia oleh penggunaan e-katalog	Laporan	Laporan monitoring dan evaluasi penilaian penyedia oleh penggunaan e-katalog	BPBJ
					5. Spesifikasi barang yang dibutuhkan belum dapat dipenuhi oleh penyedia dalam negeri	Menurunnya Belanja Produk Impor dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	% Belanja Produk Impor pada RUP terpenuhi	N/A	Menyusun Kebijakan Pengendalian Penggunaan Produk Impor dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	Regulasi	Jumlah Kebijakan Pengendalian Penggunaan Produk Impor dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang diterbitkan	SEKRETARIAT TIM P3DN

Tema	Indikator	Sasaran Tematik	Indikator	Target	Permasalahan (the bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Penanggung Jawab
										Satuan	Indikator	
									Melaksanakan Sosialisasi kebijakan Pengendalian penggunaan barang impor dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	Pelaku Pengadaan	Jumlah Pelaku Pengadaan yang mengikuti Sosialisasi kebijakan Pengendalian penggunaan barang impor dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	SEKRETARIAT TIM P3DN
									Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi kebijakan Pengendalian penggunaan produk impor dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	Laporan	Laporan Monitoring dan Evaluasi kebijakan Pengendalian penggunaan produk impor dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	TIM MONEV P3DN
					6. Masih rendahnya kepatuhan melaksanakan RUP sesuai pencatatan	Meningkatnya Kepatuhan dalam Penggunaan PDN/UMKM	Persentase Tindaklanjut Kebijakan Penggunaan PDN/UMKM	N/A	Melaksanakan revisi pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kota Bandung	Surat Keputusan	Jumlah Surat Keputusan Perbaikan Pembentukan Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Kota Bandung	SEKRETARIAT TIM P3DN
									Melaksanakan Pengawasan kepatuhan PD dalam Penggunaan PDN/UMKM pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Paket Pekerjaan	Jumlah Paket Pekerjaan yang dilakukan Pengawasan kepatuhan PD dalam Penggunaan PDN/UMKM pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	INSPEKTORAT

Tema	Indikator	Sasaran Tematik	Indikator	Target	Permasalahan (the bottleneck)	Sasaran	Indikator	Target	Rencana Aksi	Output		Penanggung Jawab
										Satuan	Indikator	
									Melaksanakan tindaklanjut hasil pengawasan kepatuhan Penggunaan PDN/UMKM pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Paket Pekerjaan	Jumlah Paket Pekerjaan yang ditindaklanjuti rekomendasinya atas hasil Pengawasan kepatuhan PD dalam Penggunaan PDN/UMKM pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	INSPEKTORAT

Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002